

Dinamika Pembangunan Manusia Maluku Antara Kota Ambon dan Wilayah Terluar

Jolyne Myrell Parera* dan Jemy Ricardo Parera**

* Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Kristen Indonesia Maluku

** Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

ARTICLE INFO

Riwayat Artikel:

Diterima 11 Desember 2025

Disetujui 16 Januari 2026

Keywords:

Indeks Pembangunan Manusia (IPM),
Maluku,
Kota Ambon,
Wilayah Terluar,
Ketimpangan Wilayah

ABSTRAK

Abstract : *This study is entitled The Dynamics of Human Development in Maluku: Between Urban Centers and Outermost Regions. Human development in Maluku Province faces unique challenges due to its geographical characteristics as an archipelagic region. This study aims to (1) identify the Human Development Index (HDI) based on regional categories, (2) analyze growth patterns across regions categorized as urban areas and outermost regions, and (3) examine the catch-up phenomenon. The findings indicate a significant gap in accessibility among regions. Ambon City consistently records a Very High level of human development. In contrast, the outermost regions, namely Southwest Maluku and the Tanimbar Islands, continue to struggle with low educational attainment and limited access to primary healthcare facilities. In terms of interregional connectivity and the distribution of professional personnel in education and healthcare, these factors constitute major constraints in achieving equitable human development. This condition is reflected in the Human Development Index, which remains in the low category in these regions. This article concludes that accelerating human development in Maluku Province cannot be achieved through a one-size-fits-all approach. Instead, it requires asymmetric policies that prioritize the strengthening of basic infrastructure in order to reduce the development gap between the outermost regions and the urban core, particularly (Ambon City).*

Abstrak : Penelitian ini berjudul Dinamika Pembangunan Manusia Maluku Antara Kota dan Wilayah Terluar Pembangunan manusia di Provinsi Maluku diperhadapkan dengan tantangan geografis yang unik sebagai wilayah kepulauan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengidentifikasi IPM berdasar kategori wilayah, (2) Menganalisis pertumbuhan tiap wilayah dengan kategori wilayah kota dan wilayah terluar dan (3) Analisa Fenomena *catch-up*. Hasil kajian menunjukkan bahwa adanya kesenjangan aksesibilitas yang signifikan. Sementara Kota Ambon secara konsisten mencatatkan status pembangunan manusia dengan kategori Sangat Tinggi. Disisi lain Untuk wilayah terluar (Maluku Btrat Daya dan Kepulauan Tanimbar) masih bergelut dengan rendahnya pendidikan dan keterbatasan fasilitas kesehatan primer atau dasar. Dari sisi faktor konektivitas antar wilayah dan distribusi tenaga professional di bidang pendidikan maupun kesehatan menjadi kendala utama dalam pemerataan kualitas pembangunan manusia, hal ini dilihat dari Indeks pembangunan Manusia masih dalam kateori rendah. Artikel ini menyimpulkan bahwa akselerasi pembangunan manusia di Provinsi Maluku tidak dapat dilakukan dengan pendekatan *one-size-fits-all*, melainkan memerlukan kebijakan asimetris yang memprioritaskan penguatan infrastruktur dasar guna memperkecil gap pembangunan dengan pusat kota (Kota Ambon).

Open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Alamat Korespondensi :

Jolyne Myrell Parera,

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan,

Universitas Kristen Indonesia Maluku,

Jln Ot Pattimaipauw, RT.003/RW.003, Talake, Kel Wainitu, Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku

E-Mail : jolyne_parera@gmail.com

Pendahuluan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia melalui tiga dimensi dasar: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak¹. IPM berfungsi sebagai tolok ukur untuk melihat sejauh mana kebijakan pemerintah mampu memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk untuk hidup sejahtera. Di wilayah kepulauan seperti Maluku, dinamika IPM menjadi sangat krusial karena mencerminkan efektivitas distribusi pembangunan di tengah tantangan geografis yang kompleks. Pada periode 2023–2024, Provinsi Maluku menunjukkan tren pertumbuhan positif yang patut diapresiasi. IPM Provinsi Maluku secara keseluruhan meningkat dari 70,94 pada tahun 2023 menjadi 71,57 pada tahun 2024. Namun, di balik angka agregat tersebut, terdapat dinamika yang kontras antara wilayah pusat pertumbuhan (Kota Ambon) dan wilayah terluar yang berbatasan langsung dengan laut lepas atau negara tetangga (seperti Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya).

Kota Ambon sebagai representasi pusat pertumbuhan memiliki status IPM yang melampaui rata-rata provinsi, menjadikannya satu-satunya wilayah dengan kategori "Sangat Tinggi" di Maluku. Sebaliknya, wilayah terluar seperti Maluku Barat Daya dan Kepulauan Tanimbar menunjukkan angka IPM yang lebih rendah, namun memiliki daya kejut pertumbuhan (akselerasi) yang sangat dinamis. Perbedaan ini menciptakan urgensi untuk menganalisis apakah pertumbuhan di wilayah terluar sudah cukup efektif untuk memperkecil ketimpangan pembangunan manusia di Maluku.

Tabel 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Berdasar Kabupaten Kota di Provinsi Maluku
Tahun 2023-2024

WILAYAH	TAHUN		Laju Pertumbuhan
	2023	2024	
Maluku Tenggara Barat/Kepulauan Tanimbar (Wilayah Terluar)	64,16	64,83	0,67
Maluku Tenggara	67,57	68,24	0,67
Maluku Tengah	72,45	73,21	0,76
Buru	70,56	71,01	0,45
Kepulauan Aru	65,01	65,83	0,82
Seram Bagian Barat	67,56	68,39	0,83
Seram Bagian Timur	65,82	66,24	0,42
Maluku Barat Daya (Wilayah Terluar)	63,93	64,86	0,93
Buru Selatan	66,23	67,09	0,86
Kota Ambon	82,06	82,56	0,50
Tual	69,67	70,21	0,54
Provinsi Maluku	70,94	71,57	0,63

Sumber, BRS, Provinsi Maluku, 2023-2024

Merujuk pada tabel 1 di atas, menunjukkan bahwa akselerasi wilayah terluar untuk Kabupaten Maluku Barat Daya laju pertumbuhan tertinggi yaitu 0,93, walaupun secara absolut nilai IPM masih rendah, namun kecepatan pertumbuhan yang tinggi menunjukkan bahwa intervensi pembangunan di wilayah terluar Kabupaten Maluku Barat Daya sangat progresif dibanding Kota Ambon dengan laju pertumbuhan sebesar 0,50, padahal IPM Kota Ambon dalam kriteria kategori sangat tinggi yaitu 82,06 di tahun 2023 dan naik di tahun 2024 yaitu sebesar 82,56. Secara Spasial dapat dikatakan bahwa wilayah dengan IPM tinggi biasanya mengalami perlambatan pertumbuhan, karena ruang untuk ekspansi layanan dasar sudah hamper maksimal.

Dari penjelasan seperti yang sudah diuraikan di atas, masih terdapat kesenjangan spasial antara Kota Ambon sebagai Ibukota Provinsi Maluku dengan wilayah terluar, bahwa layanan dasar di wilayah terluar masih belum merata. Fenomena ini menjadi pertanyaan yang menggelitik peneliti untuk mengidentifikasi laju pertumbuhan manusia di Kota Ambon dan Wilayah terluar dengan melihat akselerasi tercepat, dan memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika pembangunan manusia di wilayah terluar di Provinsi Maluku

Tinjauan Pustaka

Konsep Pembangunan Manusia (*Human Development*)

Pembangunan bukan hanya dipandang dari sudut peningkatan pendapatan nasional (PDB) semata, melainkan memiliki dimensi yang luas yakni: (1). Pembangunan sebagai kebebasan (*Development as Freedom*) pembangunan sebagai proses perluasan kebebasan hakiki yang

dinikmati oleh manusia. Bahwa kebebasan hakiki yang dimaksudkan adalah; (a) Peran instrument mencakup kebebasan politik dan ekonomi; (b) Peran Konstituiif mencakup kesehatan dan terdidik. (2) Fungsi (*Functionings*) yakni menjadi sehat, memiliki pengetahuan, dapat berpartisipasi dalam masyarakat. dan Kapabilitas (*Capabilities*) yakni memiliki fungsi pilihan dan peluang. Seperti memiliki peluang untuk sehat dan pintar. (3) Konversi Komoditas menjadi Kapabilitas. Dalam kaitan dengan penelitian ini maka dapat dikatakan kemampuan seseorang untuk mengkonversikan pendapatan menjadi hidup sehat, karena berada di wilayah Kota dekat dengan fasilitas kesehatan seperti Rumah sakit. Sedangkan yang berada di wilayah terluar pendapatan mungkin sulit untuk dikonversikan menjadi kesehatan karena kendala geografis dan minimnya fasilitas. Sehingga lebih diarahkan kepada ketersediaan sarana dasar (pendidikan, kesehatan). (4) Agensi (*Agency*), bahwa manusia bukan obyek pasif dari pembangunan, melainkan agen yang mampu membuat perubahan.

Teori Pertumbuhan Inklusif dan Disparitas Spasial

Teori pertumbuhan inklusif lebih menekankan pada aspek kesempatan bersama dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks IPM pertumbuhan inklusif terjadi ketika peningkatan kualitas hidup tidak hanya dinikmati oleh penduduk di pusat kota, tapi juga menjangkau wilayah terluar. Pertumbuhan inklusif bukan hanya dari angka kenaikan, tetapi dari seberapa besar daerah tertinggal mampu mengejar (*catch-up*) daerah maju, melalui perbaikan akses kesehatan dan pendidikan.

Teori Disparitas spasial mengacu pada ketimpangan pembangunan antar wilayah. Dalam wilayah kepulauan seperti Maluku, disparitas ini sering dipicu oleh dua faktor yakni (1) Keunggulan Aglomerasi: Wilayah seperti Kota Ambon memiliki konsentrasi modal, infrastruktur, dan SDM yang tinggi, sehingga menciptakan pertumbuhan yang stabil namun cenderung terkonsentrasi. (2) Kendala Geografis (*Distance Decay*): Wilayah terluar sering mengalami pertumbuhan yang lambat karena tingginya biaya logistik dan keterisolasian akses layanan publik.

Teori Dinamika Pusat-Periferi Dan Efek CATCH-UP

Teori ini dalam konteks geografi ekonomi, menjelaskan bahwa pembangunan tidak terjadi secara merata di setiap wilayah, melainkan terkonsentrasi di titik-titik tertentu. Titik-titik terjadinya pembangunan di sebut sebagai berikut : (1) Pusat (*Core*): Wilayah seperti wilayah ibu kota yang memiliki keunggulan aksesibilitas, infrastruktur, dan layanan publik. Pusat cenderung menyerap sumber daya dari wilayah sekitarnya (efek *backwash*). (2) Periferi (*Periphery*): Wilayah terluar atau pinggiran Secara historis, wilayah ini tertinggal karena jarak geografis dan keterbatasan konektivitas.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memotret kondisi riil Indeks Pembangunan Manusia(IPM) di provinsi Maluku. Pendekatan Komparatif digunakan untuk membandingkan dinamika pertumbuhan antara pusat pertumbuhan Kota dalam hal ini Kota Ambon dan wilayah Terluar yaitu Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya pada periode waktu 2023 dan 2024.

Metode Analisa Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang bersumber dari laporan berkala Badan Statistik Provinsi Maluku yaitu IPM Provinsi Maluku. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: (1) Studi Dokumentasi berupa data IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku tahun 2023 dan 2024 dari Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku.. (2). Observasi Data yakni melakukan pencatatan terhadap variable-variabel IPM di wilayah yang di kategorikan sebagai pusat pertumbuhan (Kota Ambon dan wilayah kepulauan terluar. Yaitu Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya.

Analisis data dilakukan melalui tahapan (1) Analisis tabel yakni menyusun data IPM tahun 2023 dan tahun 2024 untuk melakukann identifikasi berdasar kategori wilayah (Wilayah Kota dan wilayah terluar). (2) Analisis Selisih pertumbuhan dengan cara menghitung perubahan atau delta IPM untuk menganalisis dinamika pertumbuhan pembangunan di tiap Wilayah kabupaten/Kota dengan menggunakan rumus : $\text{Pertumbuhan} = \text{IPM Tahun 2024} - \text{IPM Tahun 2023}$. (3) Menggunakan visualisasi *Line Chard* untuk membandingkan laju pertumbuhan Wilayah Kota dan Wilayah terluar guna melihat fenomena *chatch-up*

Hasil Dan Pembahasan

Identifikasi IPM Berdasarkan Kategori Wilayah

Berdasarkan tabel 1 seperti disebutkan pada bagian pendahuluan di atas menunjukkan bahwa Wilayah Kota Ambon merupakan pusat pertumbuhan, dengan IPM tertinggi di Provinsi Maluku yakni 82,06 untuk tahun 2023 dan meningkat menjadi 82,56 di tahun 2024, dengan memiliki katgori IPM Sangat Tinggi. Pada sisi lain Kota Tual mencatatkan IPM sebesar 69,67 pada tahun 2023 dan naik menjadi 70,21 pada tahun 2024. Dengan angka ini, Kota Tual berhasil bertransisi dari kategori Sedang ke kategori Tinggi.

Untuk Wilayah Terluar Kepulauan Tanimbar memiliki nilai IPM 64,16 di tahun 2023 meningkat menjadi 64,83 di tahun 2024. Maluku Barat Daya mencatatkan nilai IPM 63,93 tahun 2023 dan meningkat menjadi 64,86 di tahun 2024. Meskipun nilai absolutnya merupakan yang terendah di Maluku, wilayah ini menunjukkan dinamika pertumbuhan yang paling progresif. Wilayah Kabupaten Lainnya yakni Maluku Tengah memiliki IPM tertinggi di tingkat kabupaten yaitu 73,21 pada tahun 2024.

Kabupaten Buru IPM 71,01 mengikuti di posisi kedua untuk kategori kabupaten pada tahun 2024, sementara Kabupaten lainnya seperti Seram Bagian Barat IPM sebesar 68,39, Maluku Tenggara dengan IPM 68,24, dan Buru Selatan IPM sebesar 67,09 berada pada rentang kategori Sedang

Analisis Dinamika Pertumbuhan Tiap Wilayah.

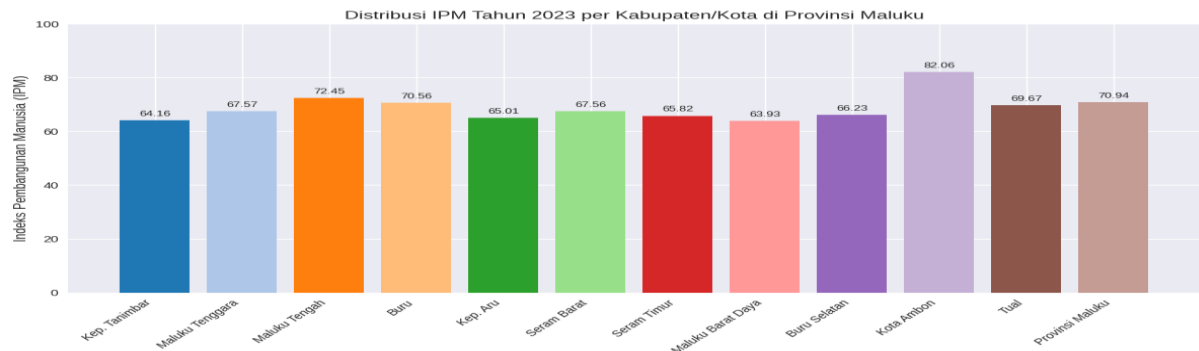
Merujuk pada tabel 1 pada bagian pendahuluan di atas, menunjukkan bahwa dinamika pembangunan manusia di Provinsi Maluku menunjukkan fenomena yang menarik, dimana wilayah dengan IPM rendah tumbuh lebih cepat, dibandingkan wilayah dengan IPM tinggi.

Kota Ambon mempertahankan posisinya sebagai wilayah dengan tingkat pembangunan manusia tertinggi di Maluku, mencapai angka 82,56 pada tahun 2024. Nilai ini mencerminkan konsentrasi infrastruktur pendidikan dan layanan kesehatan berada di ibu kota provinsi. Meskipun memiliki angka absolut yang sangat tinggi, namun pertumbuhan IPM Kota Ambon sebesar 0,50 poin berada di bawah rata-rata pertumbuhan kabupaten lain. Hal ini mengindikasikan bahwa wilayah pusat telah mencapai titik kemapanan di sektor kesehatan dan pendidikan, sehingga pertumbuhan IPM, cenderung lebih lambat. Sebaliknya, Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya yang adalah wilayah terluar, secara absolut nilai IPM masih berada pada level 64 poin, dengan laju pertumbuhan untuk Maluku Barat Daya tertinggi yakni 93 poin dan Kepulaun Tanimbar 67 poin hal ini menunjukkan perlunya perhatian serius untuk mengejar ketertinggalan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa program intervensi pembangunan di wilayah terluar dan terpencil mulai menunjukkan dampak yang lebih besar dibandingkan daerah perkotaan yang sudah cenderung stabil.

Wilayah kepulauan besar seperti Pulau Seram dan Pulau Buru menunjukkan tren yang beragam. Seram Bagian Barat tumbuh signifikan sebesar 0,83 poin, melampaui tetangganya Seram Bagian Timur yang hanya tumbuh 0,42 poin. Hal ini menunjukkan adanya disparitas efektivitas program pembangunan meskipun kedua daerah tersebut berada di satu daratan besar yang sama. Secara menyeluruh Provinsi Maluku telah berhasil keluar dari stagnasi dengan kenaikan IPM di setiap kabupaten yang terdata. Meskipun Kota Ambon mendominasi secara kualitas, arah pembangunan di tahun 2024 menunjukkan fokus yang lebih inklusif ke wilayah-wilayah selatan dan kepulauan terluar Maluku. Di tahun 2023,2024namika ini menunjukkan bahwa meskipun ada kesenjangan (disparitas) nilai absolut, arah pembangunan di Maluku menuju ke arah yang sehat. Jika laju pertumbuhan wilayah periferi terus konsisten melampaui pusat, maka dalam jangka panjang akan terjadi pemerataan kualitas hidup di seluruh Provinsi Maluku.

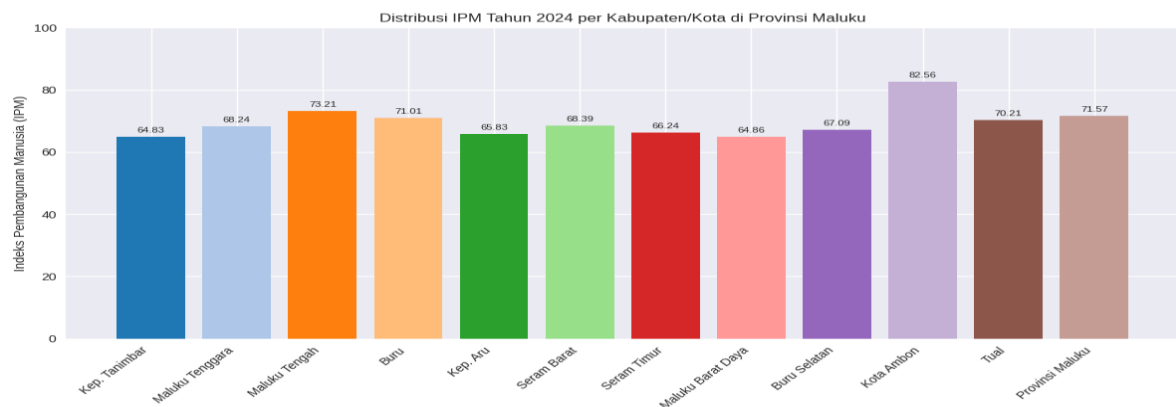
Fenomena *Catch-up*

Gambar 1. Distribusi IPM Tahun 2023 Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Maluku



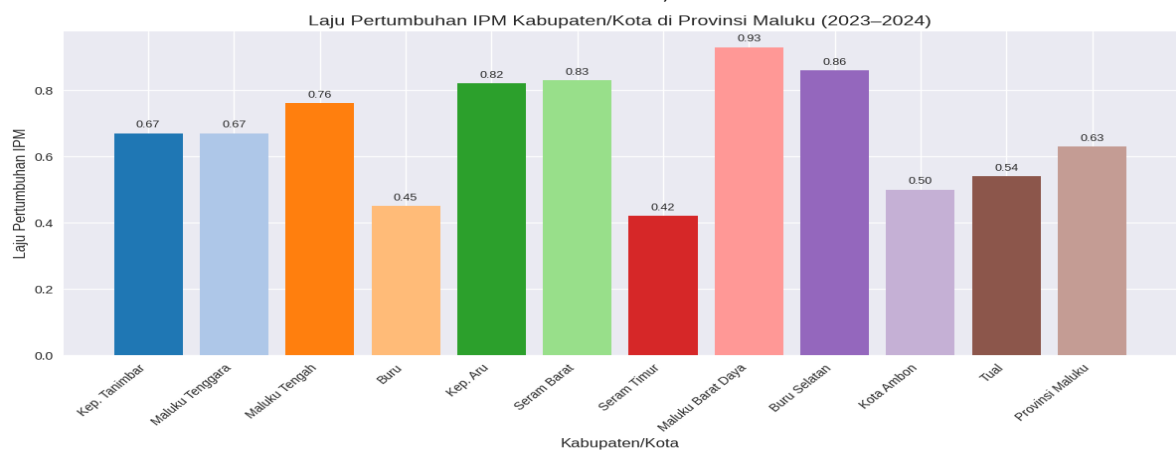
Sumber: diolah dari tabel 1

Gambar 2. Distribusi IPM Tahun 2024 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku



Sumber: diolah dari tabel 1

Gambar 3. Laju Pertumbuhan IPM Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Maluku Tahun 2023,2024



Sumber: diolah dari tabel 1

Fenomena *Catch-up* atau konvergensi dapat terlihat pada gambar1-3 di atas menunjukkan kecepatan perubahan hidup masing-masing daerah dapat dijelaskan demikian. (1) Untuk wilayah Maluku Barat Daya: Akselerasi Tertinggi Kabupaten Maluku Barat Daya mencatatkan kenaikan tertinggi sebesar 0,93 poin. Meskipun secara angka mutlak IPM-nya masih berada di papan bawah 64,86, kecepatan pertumbuhannya menunjukkan bahwa upaya pemerataan pembangunan di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) mulai membuahkan hasil signifikan. (2). Stabilitas Kota Ambon memiliki pertumbuhan sebesar 0,50 poin. Angka pertumbuhan ini cenderung lebih rendah

dibanding kabupaten lain karena IPM Ambon sudah berada pada kategori "Sangat Tinggi 82,56. Secara teori, daerah dengan IPM tinggi biasanya mengalami perlambatan pertumbuhan karena ruang untuk ekspansi layanan dasar sudah hampir maksimal. (3). Konsistensi Wilayah Kepulauan seperti Kepulauan Aru 0,82 dan Buru Selatan 0,8) menunjukkan performa yang kuat. Hal ini mengindikasikan bahwa akses terhadap pendidikan dan kesehatan di wilayah kepulauan sedang mengalami perbaikan yang masif dalam satu tahun terakhir. (4). Tantangan di wilayah Seram Bagian Timur mencatatkan pertumbuhan terendah dalam daftar ini, yaitu 0,42 poin. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi lebih mendalam mengenai efektivitas program pembangunan manusia di wilayah tersebut agar tidak tertinggal jauh dari kabupaten tetangga seperti Seram Bagian Barat yang tumbuh pesat sebesar 0,83 poin.

Ketika wilayah yang memiliki tingkat pembangunan awal yang rendah tumbuh lebih cepat daripada wilayah yang sudah maju. Dalam konteks data ini, wilayah terluar di Maluku menunjukkan akselerasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan Kota Ambon sebagai pusat pertumbuhan.

Akselerasi Wilayah Terluar: Kabupaten Maluku Barat Daya mencatatkan laju pertumbuhan tertinggi di seluruh provinsi sebesar 0,93 poin dari 63,93 ke 64,86. Pertumbuhan Wilayah Kepulauan: Kabupaten Buru Selatan 0,86 dan Kepulauan Aru 0,8 juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan di atas rata-rata provinsi. Stagnasi Relatif di Pusat: Kota Ambon, yang memiliki nilai absolut IPM tertinggi 82,56, justru memiliki laju pertumbuhan yang lebih rendah, yaitu 0,50 poin. Meskipun terjadi efek *catch-up*, tantangan besar tetap ada pada disparitas nilai absolut. Terdapat selisih sebesar 17,7 poin antara Kota Ambon 82,56 dan wilayah terluar seperti Maluku Barat Daya 64,86. Hal ini berarti, meskipun wilayah terluar berlari lebih cepat, mereka masih membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk benar-benar setara dengan kualitas hidup di pusat kota.

Kesimpulan

1. Peningkatan Kolektif: Seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Maluku yang terdata mengalami kenaikan nilai IPM, yang mendorong kenaikan angka Provinsi dari 70,94 2023 menjadi 71,57 2024.
2. Dinamika Pusat dan Terluar: Terjadi kontras yang signifikan antara wilayah pusat dan terluar. Kota Ambon tetap mendominasi dengan IPM tertinggi mencapai 82,56 pada tahun 2024. Namun, wilayah terluar seperti Maluku Barat Daya mencatatkan laju pertumbuhan tercepat sebesar 0,93 poin dari 63,93 ke 64,86, menunjukkan adanya upaya pengejaran ketertinggalan (*catch-up*).
3. Kesenjangan yang Masih Lebar: Meskipun wilayah terluar tumbuh lebih cepat secara persentase poin, selisih absolut antara Kota Ambon dan daerah seperti Kepulauan Tanimbar 64,83 masih sangat tinggi, yaitu sekitar 17,73 poin pada tahun 2024.
4. Pertumbuhan Variatif di Kepulauan: Daerah kepulauan lain seperti Buru Selatan 0,86 dan Kepulauan Aru 0,82 juga menunjukkan dinamika pertumbuhan yang kuat di atas rata-rata provinsi, menandakan intervensi pembangunan yang mulai merata di zona periferi.
5. Fenomena *catch-up* di Maluku tahun 2023-2024 adalah indikator positif bahwa pembangunan manusia mulai inklusif. Wilayah terluar bukan lagi sekadar penonton, melainkan motor pertumbuhan baru bagi IPM Maluku secara keseluruhan.

Saran -Saran

1. Akselerasi Wilayah Tertinggal : Pemerintah perlu mempertahankan dan meningkatkan alokasi anggaran khusus untuk penguatan layanan dasar (kesehatan dan pendidikan) di wilayah dengan IPM di bawah 70, seperti Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya.
2. Fokus pada Seram Bagian Timur : Mengingat pertumbuhan di Seram Bagian Timur merupakan yang terendah 0,42, diperlukan evaluasi terhadap program pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal di wilayah tersebut.
3. Penguatan Konektivitas : Mengingat hambatan geografis di wilayah terluar, pembangunan infrastruktur digital dan transportasi menjadi krusial untuk menurunkan biaya hidup yang berdampak pada dimensi standar hidup layak dalam IPM.
4. Digitalisasi Layanan di Pusat : Bagi Kota Ambon, fokus pembangunan dapat diarahkan pada kualitas (bukan sekadar kuantitas) melalui digitalisasi layanan publik untuk mempertahankan status IPM "Sangat Tinggi".

Daftar Pustaka

- Alkire, S., & Jahan, S. (2021). *New Metrics for a New Era: The Human Development Index and Beyond*. Journal of Human Development and Capabilities, 22(1), 1-18.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku. (2024). *Data Indeks Pembangunan Manusia Berdasar Kabupaten Kota Provinsi Maluku Tahun 2023-2024*
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Indeks Pembangunan Manusia 2024: Menuju Transformasi Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: BPS RI.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku. (2024). *Provinsi Maluku Dalam Angka 2024*. Ambon: BPS Maluku.
- Bhattacharya, R. (2021). *The Geography of Inequality: Spatial Disparities in Developing Countries*. Oxford University Press.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- Krugman, P. (2022). *Geography and Trade: The Core-Periphery Model Revisited*. Princeton University Press.
- Moretti, E. (2023). *The New Geography of Jobs and Human Capital*. Journal of Economic Perspectives, 37(1). Membahas bagaimana wilayah pinggiran mengejar ketertinggalan melalui modal manusia
- Mulyadi, S. (2022). *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers. (Membahas spesifik mengenai disparitas antarwilayah di Indonesia Timur).
- Pike, A., Rodriguez-Pose, A., & Tomaney, J. (2024). *Local and Regional Development*. Routledge. Menjelaskan dinamika pusat-pinggiran dalam
- Sen, A. (2020). *Development as Freedom and Human Capability* (Updated Perspectives). Oxford University Press.
- Stiglitz, J. E., Fitoussi, J. P., & Durand, M. (2020). *Measuring What Counts: The Global Movement for Well-Being*. New York: The New Press.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- UNDP. (2022). *Human Development Report 2021-22: Uncertain Times, Unsettled Lives: Shaping our Future in a Transforming World*. New York: United Nations Development Programme.
- United Nations. (2023). *The Sustainable Development Goals Report 2023: Special Edition*. New York: UN Publishing.